**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kabupaten Aceh Tengah TA 2014**

**Banda Aceh, Senin ( 27 April 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabuapten Aceh Tangah Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Keenam di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabuapten Aceh Tangah dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kabuapten Aceh Tangah untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau *"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan kas di bendahara pengeluaran pada beberapa SKPK belum tertib;
3. Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya tertib;
4. Pengelolaan piutang retribusi daerah belum sepenuhnya tertib;
5. Pengelolaan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya tertib;
6. Pengendalian atas penyusunan laporan keuangan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan belum optimal.
7. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
8. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak sesuai ketentuan;
9. Penyampaian pertanggungjawaban Hibah/Bansos dan Dana Pendamping Dana Stimulasi Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rusak Berat Akibat Gempa belum memadai;
10. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sehat Sederhana tidak sesuai spesifikasi.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kabuapten Aceh Tengah segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*